



Rencana Strategi (Renstra) Dinas  
Perikanan Kabupaten Biak Numfor Tahun  
2019-2023



**KABUPATEN BIAK NUMFOR  
2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR**  
**DINAS PERIKANAN**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**NOMOR : / /DKP /2019**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) DINAS PERIKANAN**

**KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019-2023**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1988 dan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN, dipandang perlu untuk menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfortentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 ;
  - b. bahwa Renstra sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pengesahan Renstra Dinas Perikanan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 111
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan tentang Rencana Strategis Dinas Dinas PerikananTahun 2019-2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
  2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
  5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004–2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor : 4 Tahun 2018 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah nomor 3 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor ( Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 );

**12. Perda RPJMD**

13. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Biak Numfor nomor 17 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor:
14. ....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BIAK NUMFOR TENTANG RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) DINAS PERIKANAN KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2019-2023

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 – 2023 yang selanjutnya disebut dengan RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor adalah Dokumen Perencanaan Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor atas kewenangan yang diberikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor.
2. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor berlaku dari Tahun 2019 - 2023.
3. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 - 2023 memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program serta Kegiatan.

**Pasal 2**

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor memuat pengembangan sumberdaya dan sarana prasarana aparatur, Perikanan tangkap, Perikanan Budidaya, Pelayanan usaha Perikanan.

**Pasal 3**

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perikanan Biak Numfor .

**Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Biak  
Pada tanggal Nopember 2019  
Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Biak Numfor

**EFFENDI IGIRISA, S.Pi, MM**  
**NIP. 19690424 199703 1 007**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Karuniya-Nya, kami dapat menyusun Rencana Strategis untuk Tahun 2019-2023, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sitem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15, bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyiapkan Rencana Strategis (RENSTRA).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Perencanaan Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor merupakan perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis sebagai komitmen Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor dalam meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Government).

Dengan adanya Rencana Strategis ini akan sangat berguna bagi Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor sebagai acuan dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Walaupun Rencana Strategis ini sudah disusun dengan usaha maksimal, tetapi kiranya masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan kami. Dan oleh sebab itu kami dengan rendah hati dan rasa penuh keterbukaan dapat menerima saran - saran dan masukan dari semua pihak.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Biak, Nopember 2019  
Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Biak Numfor

**EFFENDI IGIRISA, S.Pi, MM**  
**NIP. 19690424 199703 1 007**

## Daftar Isi

KATA PENGANTAR .....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I .....	5
PENDAHULUAN .....	5
1. 1. Latar Belakang .....	5
1. 2. Landasan Hukum .....	6
1. 3. Maksud dan Tujuan .....	7
1. 4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II .....	9
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN .....	9
2. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan .....	9
2. 2. Sumber Daya Dinas Perikanan .....	15
2. 3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan .....	16
2. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan .....	33
BAB III .....	34
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	34
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan.....	34
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	35
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	40
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)45	
3.4 Penentuan Isu – Isu Strategis .....	48
BAB IV` .....	50
TUJUAN DAN SASARAN .....	50
4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Perikanan.....	50
4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan .....	50
BAB V .....	54
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	54
5.1. Stretegi.....	54
5.2. Arah dan Kebijakan .....	54
BAB VI .....	57
RENCANA PRGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	57
BAB VII .....	64
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	64
7.1. Indikator Kinerja .....	64
7.2. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci .....	64
BAB VIII .....	68
P E N U T U P.....	68

**DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 1. 1. Bagan Alur Perencanaan dan Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- Gambar 2. 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kab, Biak Numfor .....

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Daftar Perincian Golongan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 .....	15
Tabel 2. 2. Jumlah PNS/CPNS menurut pendidikan .....	15
Tabel 2. 3. Daftar Asset Modal Dinas Dinas Perikanan Tahun 2013 .....	16
Tabel 2. 7. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Dinas Perikanan dari tahun 2009 sampai dengan 2023	
Tabel 3. 1. Tujuan dan Sasaran Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 .....	39
Tabel 3. 2. Visi dan Misi RPJMD Provinsi Papua , Visi : “Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera” .....	42
Tabel 4. 1. Keselarasan dengan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pada Misi 6 RPJMD Kabupaten Biak Numfor .....	52
Tabel 5. 1. Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan kab. Biak Numfor tahun 2019-2023	
Tabel 5. 2. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan .....	
Tabel 6. 1. Tabel Indikator Kinerja Dinas Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2023 .....	57



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

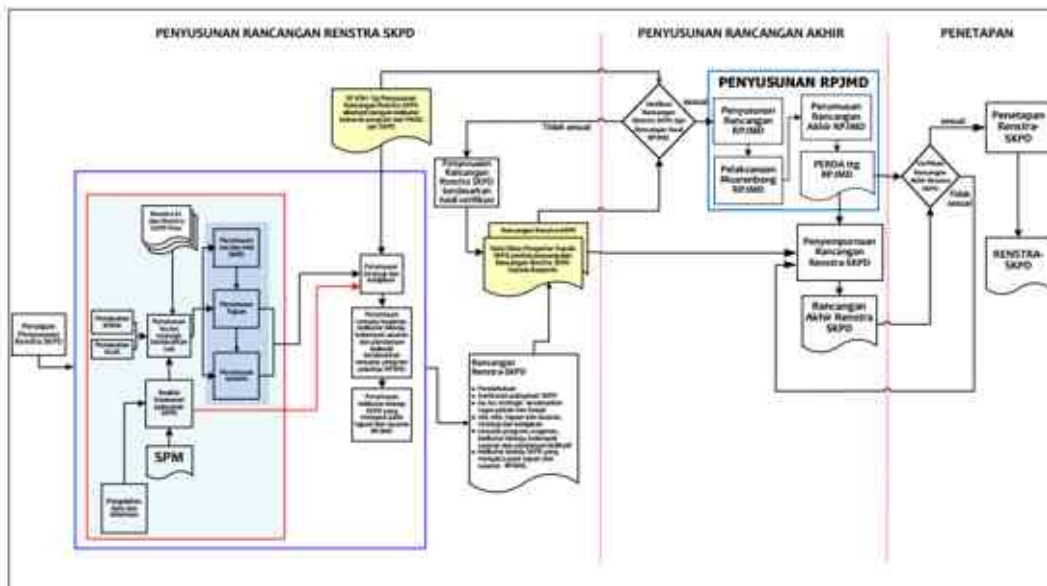
Penyusunan dan penetapan RESNTRA-Perangkat Daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Pengelolaan keuangan Negara, sedangkan sistematika penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 111 yang mencakup :

1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
3. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah;
4. Tujuan dan Sasaran;
5. Strategi dan Arah Kebijakan;
6. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
8. Penutup.

Sebagai salah satu perangkat daerah, Dinas Perikanan berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan. Kewajiban ini selain sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka Pembangunan Kabupaten Biak Numfor untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Penyusunan RENSTRA ini berpedoman pada RPJM Kabupaten Biak Numfor dan dilakukan review juga terhadap RENSTRA Kementerian Kelautan dan Perikanan dan RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua. Proses penyusunan Rencana Strategi dijelaskan sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1.1 Bagan Alur Perencanaan dan Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



## 1. 2. Landasan Hukum

RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang -undang nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan
6. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. ....
9. RPJMD

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1. Tujuan

Secara Umum tujuan penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai gambaran rencana pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) Tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan secara khusus tujuannya adalah :

- a. Mengidentifikasi (*review*) secara menyeluruh kondisi pembangunan perikanan melalui pengukuran pelayanan/kinerja periode yang lalu Sebagai Rencana Strategis Dinas Perikanan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Merumuskan arah kebijakan dan strategi Dinas Perikanan;
- c. Merumuskan prioritas program dan kegiatan Dinas Perikanan;

#### 1.3.2. Maksud

Sesuai dengan uraian tujuan tersebut di atas, maka maksud dari penyusunan RESNTRA Dinas Perikanan ini adalah sebagai berikut:

- a. Teridentifikasinya kondisi pembangunan Perikanan melalui pelayanan/kinerja terkini;
- b. Tersusunnya strategi dan arah kebijakan Dinas Perikanan;
- c. Tersusunnya program prioritas dan kegiatan dalam Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Perikanan berdasarkan kerangka pendanaan indikatif.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Dokumen Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor meliputi enam bab pembahasan dan satu bab penutup, sebagai berikut :

- a. **Bab I Pendahuluan**, menjelaskan mengenai latar belakang pentingnya penyusunan dokumen perencanaan strategis Dinas Perikanan, landasan hukum yang memayunginya, maksud dan tujuan penyusunan dokumen, dan sistematika penulisan;
- b. **Bab II Gambaran Pelayanan**, menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Perikanan berikut sumber daya, kondisi kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perikanan;

- c. **Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Perikanan** berdasarkan tugas mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perikanan telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Biak Numfor Telaahan RENSTRA Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan Provinsi Papua serta penentuan isu-isu strategis Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor;
- d. **Bab IV Tujuan, Sasaran**, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor;
- e. **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**, berisi strategi dan arah kebijakan Dinas Perikanan dan lima tahun mendatang;
- f. **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**, berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif;
- g. **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**, berisi indikator kinerja Dinas Perikanan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;
- h. **Bab VIII Penutup**, berisi ringkasan RENSTRA serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan mengimplementasi RENSTRA Dinas Perikanan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor : 4 Tahun 2018 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah nomor 3 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor ( Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 ); dan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Biak Numfor nomor 17 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor, dan sebagai OPD teknis yang melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas tugas pembantuan dalam bidang urusan Perikanan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **2. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan**

Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Bidang Perikanan, serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perikanan dan Kekautan ;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perikanan; Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perikanan;
- d. Pelaksanaan ketatausahaan dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Biak Numfor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ Susunan Organiasai Dinas Perikanan, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretaris;
- c. Kepala Bidang Perikanan Tanagkap
- d. Kepala Bidang Bidang Perikanan Budidaya;
- e. Bidang Pelayanan Usaha Perikanan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Dins Perikanan Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2) Sub Bagian Program dan Keuangan
- c. Bidang Perikanan Tangkap
  - 1) Seksi Sarana, Prasarana dan Penerapan Teknologi Tangkap;
  - 2) Seksi Pemberdayaan Kenelayanan; dan
  - 3) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Pengendalian Penangkapan.
- d. Bidang Perikanan Budidaya
  - 1) Seksi Pengembangan Budidaya dan Penerapan Teknologi Perikanan;
  - 2) Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Perijinan Budidaya Ikan; dan
  - 3) Seksi Produksi Usaha Perikanan Budidaya dan Kesehatan Ikan.
- e. Bidang Pelayanan Usaha Perikanan
  - 1) Seksi Bina Mutu Produk Ikan dan Pengolahan Hasil Perikanan;
  - 2) Seksi Pemasaran Hasil Produksi Perikanan; dan
  - 3) Seksi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan.

Tugas, fungsi dan rincian tugas dari masing-masing susunan organisasi Dinas Perikanan sebagai berikut :

#### 1. Kepala Dinas

- (1) Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan serta tugas lainnya yang diberikan Bupati;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi:
  - a) Perumusan kebijakan teknis dibidang Perikanan;
  - b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perikanan;
  - c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perikanan;
  - d) Pelaksanaan ketatausahaan dinas; dan
  - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Biak Numfor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2. Sekretariat Dinas

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu tugas-tugas Dinas dalam menyelenggarakan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang umum dan kepegawaian, penyusunan program dan keuangan dilingkungan dinas Perikanan;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan penyusunan program Dinas;
  - b) Penatausahaan urusan umum ;

- c) Penatausahaan kepegawaian;
- d) Penatausahaan keuangan; dan
- e) Pengelolaan inventaris Dinas.

### 3. Bidang Perikanan Tangkap

- (1) Bidang Perikanan Tangkap, mempunyai tugas membantu tugas-tugas dinas dalam menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan penyiapan sarana prasarana penerapan teknologi tangkap, pemberdayaan kenelayanan, serta pengelolaan sumber daya ikan dan pengendalian penangkapan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengawasan Perikanan Tangkap;
  - b. Pelaksanaan pengembangan Perikanan Tangkap;
  - c. Pembinaan dan Pengawasan usaha jasa Perikanan Tangkap;
  - d. Pembinaan dan Pengawasan standar mutu usaha jasa Perikanan Tangkap;
  - e. Pembentukan kelompok Perikanan Tangkap di lokasi kelompok-kelompok Nelayan;
  - f. Perumusan sarana prasarana dan penerapan teknologi tangkap;
  - g. Perumusan pemberdayaan kenelayanan;
  - h. Pengkoordinasian pengelolaan sumber daya ikan dan pengendalian penangkapan;
  - i. Pembinaan dan Pembentukan kelompok Perikanan Tangkap;
  - j. Pengevaluasian hasil kerja bawahan; dan
  - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya.

### 4. Bidang Perikanan Budidaya

- (1) Bidang Perikanan Budidaya, mempunyai tugas membantu tugas-tugas dinas dalam menyelenggarakan pelaksanaan urusan pengembangan budidaya dan penerapan teknologi perikanan, pembinaan kelembagaan dan perijinan budidaya ikan serta produksi usaha perikanan budidaya dan kesehatan ikan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perikanan Budidaya, menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perikanan Budidaya dan penerapan teknologi perikanan;
  - b. Penyusunan program, mengevaluasi, dan menyusun laporan dinas dibidang Perikanan Budidaya dan penerapan teknologi perikanan;
  - c. Penyusunan rencana pembinaan kelembagaan dan perijinan budidaya ikan;
  - d. Penyusunan rencana dan Program kerja operasional kegiatan produksi usaha perikanan budidaya dan kesehatan ikan;
  - e. Pelaksanaan penyusunan rancangan strategis, rencana kerja pengembangan budidaya dan penerapan teknologi perikanan;
  - f. Pengkoordinasian produksi usaha perikanan budidaya dan kesehatan ikan;
  - g. Pelaksanaan penyusunan rancangan kerja untuk penunjang pelaksanaan tugas;

- h) Pelaksanaan Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perikanan;
- i) Penyusunan Dinas Perikanan lima tahun kedepan;
- j) Pelaksanaan koordinasi kerja sama dengan bidang-bidang lain untuk penyusunan program kerja;
- k) Pembinaan, Pembimbingan dan Pemberian petunjuk kepada bawahan dalam lingkup program kerja;
- l) Pengevaluasian hasil kerja bawahan sebagai bahan pembinaan;
- m) Pelaksanaan evaluasi program untuk mengetahui tingkat pencapaian program kerja serta permasalahan yang dihadapi serta mencari penyelesaian masalah; dan
- n) Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya

#### 5. Bidang Pelayanan Usaha Perikanan

- (1) Bidang Pelayanan Usaha Perikanan mempunyai tugas membantu tugas-tugas dinas dalam menyelenggarakan pelaksanaan urusan bina mutu produk ikan dan pengelolaan hasil perikanan, pemasaran hasil produksi perikanan serta pengembangan usaha kelembagaan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Usaha Perikanan menyelenggarakan fungsi;
  - a) Perumusan kebijakan teknis di Bidang bina mutu produk ikan dan pengelolaan hasil perikanan;
  - b) Perumusan pemasaran hasil produksi perikanan;
  - c) Perumusan pengembangan usaha dan kelembagaan;
  - d) Perencanaan bina mutu produk ikan dan pengelolaan hasil perikanan;
  - e) Penyusunan rencana pemasaran hasil produksi perikanan;
  - f) Penyusunan rencana dan Program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian Pendataan dan Pengelolaan Pelayanan hasil produksi Perikanan;
  - g) Pelaksanaan penyusunan rancangan strategis, rencana kerja pengembangan usaha kelembagaan;
  - h) Penyusunan rancangan kerja perundang-undangan untuk penunjang pelaksanaan tugas tugas dilapangan;
  - i) Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perikanan bina mutu produk ikan dan pengelolaan hasil perikanan;
  - j) Penyusunan rencana pengembangan usaha dan kelembagaan ;
  - k) Pelaksanaan koordinasi kerja sama dengan bidang-bidang lain untuk penyusunan program kerja;
  - l) Pembinaan, Pembimbingan dan Pemberian petunjuk kepada bawahan dalam lingkup program kerja;
  - m) Pengevaluasian hasil kerja bawahan sebagai bahan pembinaan;
  - n) Pelaksanaan evaluasi program untuk mengetahui tingkat pencapaian program kerja serta permasalahan yang dihadapi serta mencari penyelesaian masalah; dan
  - o) Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai lingkup bidang tugasnya

#### **2. 1. 2. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Kelompok Jabatan Fungsional, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas melalui pembinaan Sekretaris, Kepala Bidang, Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing



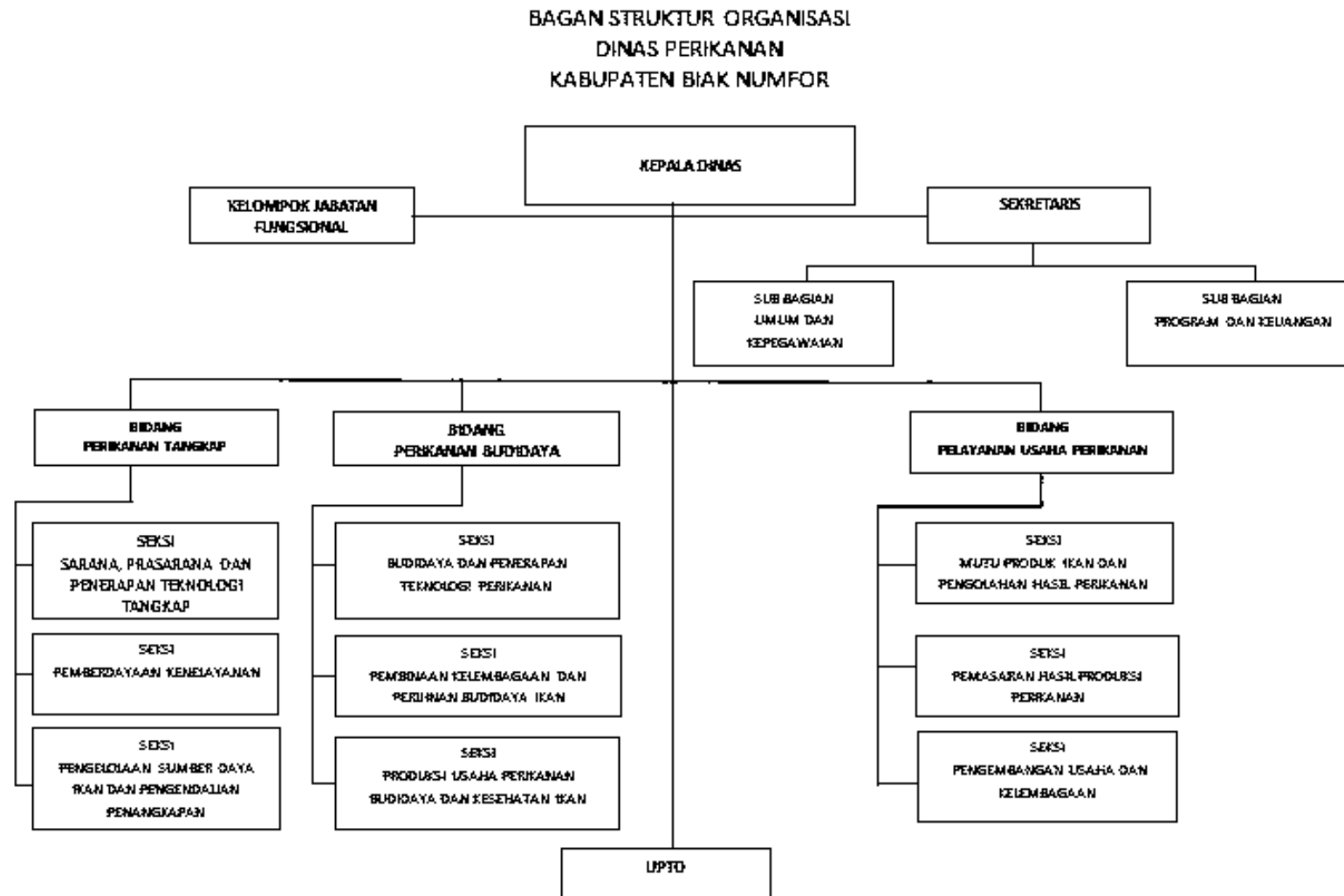
maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing :

- 1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- 3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- 4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan hasil lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- 5) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- 6) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab masing-masing dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, yang diharapkan mengadakan rapat-rapat berkala.
- 7) Dalam memperlancar pelaksanaan tugas masing-masing pimpinan organisasi dan/atau pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural dan/atau staf di lingkungan unit kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya .
- 8) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai pada bawahannya.
- 9) Masing-masing pejabat struktural dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan dan/atau atasan langsungnya sesuai dengan hirarki jenjang jabatan.

### **2. 1. 3. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Biak Numfor nomor 17 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor, bahwa struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor meliputi; Kepala Dinas, Sekretaris, dan tiga Kepala Bidang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai berikut :

Gambar 2.2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kab, Biak Numfor



## 2. 2. Sumber Daya Dinas Perikanan

Secara kelembagaan, eksistensi Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor mengalami penguatan karena secara eksplisit mengemban amanat dari peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karenanya, amanat tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan efektif. Untuk memenuhi harapan tersebut, perlu diidentifikasi kemampuan sumber daya Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor saat ini.

Sampai dengan akhir Tahun 2018 Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor didukung oleh sebanyak 53 Orang staff struktural dengan perincian :

**Tabel 2.1. Daftar Perincian Golongan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018**

No	Golongan/Ruang	Jumlah	Orang
1.	IV/e	-	-
2.	IV/d	-	-
3.	IV/c	1	-
4.	IV/b	1	Orang
5.	IV/a	4	Orang
6.	III/d	10	Orang
7.	III/c	7	Orang
8.	III/b	6	Orang
9.	III/a	5	Orang
10.	II/d	-	Orang
11.	II/c	-	Orang
12.	II/b	11	Orang
13.	II/a	7	Orang
14.	I/d	-	
15.	I/c	1	
16.	I/b	-	orang
17.	I/a	-	
<b>JUMLAH</b>		<b>53</b>	<b>Orang</b>

**Tabel 2. 2. Jumlah PNS/CPNS menurut pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Orang
1.	Strata 3 (S3)	-	-
2.	Strata 2 (S2)	6	Orang
3.	Strata 1 (S1)	22	Orang
4.	Diploma IV (DIV)	1	Orang
5.	Diploma III (DIII)	8	Orang
6.	Diploma II (DII)	-	Orang
7.	Diploma I (DI)	-	Orang
8.	SLTA	20	Orang
9.	SLTP	-	Orang
10.	SD	1	Orang
<b>JUMLAH</b>		<b>53</b>	<b>Orang</b>

Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian :

1. PNS : 53 Orang
2. CPNS : - Orang

➤ Asset / Modal

Sampai pada akhir tahun 2018 jumlah asset yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfordiantaranya yaitu Rp. 52.025.129.480.053,65,- berupa Asset tanah, Rp. 5.978.185.915,00,- berupa asset peralatan dan Mesin, Rp. 2.533.281.183,65,- berupa Asset gedung dan bangunan, Rp. 36.870.364.000,- berupa jalan, irigasi dan jembatan, Rp. 4.123.973.317,00 dan 446.857.100,00 berupa asset tetap lainnya, Asset tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3. Daftar Asset Modal Dinas Perikanan Tahun 2018

Kode Rekening	Jenis / Golongan	Tanah (RUB. A)	Peralatan dan Mesin (RUB. B)		Gedung dan Bangunan (RUB. C)		Jalan, Jembatan dan Bangunan (RUB. D)		Asset Tetap Lainnya (RUB. E)	KDP (RUB. F)
		Harga Perolehan (Rp)	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Harga Perolehan (Rp)	
6.1	<b>GOL. TANAH</b>									
01.01	Tanah Kasar	2.130.000.000,00								
6.2	<b>GOL. PERALATAN DAN MESIN</b>									
02.02	Alat - Alat Besar		5.282.562.753,00	2.749.934.682,71						
02.04	Alat - Alat Angkutan		221.463.234,27	11.786.178,54						
02.05	Alat - Alat Pertanian dan Peternakan		778.185.000,00	0,00						
02.06	Alat - Alat Kantor dan Rumah Tangga		2.138.190.613,39	281.854.967,72						
02.07	Alat - Alat Sekolah dan Kambus		11.048.400,00	18.800.000,00						
02.08	Alat - Alat Industri		0,00	0,00						
02.09	Alat - Alat Laboratorium		148.810.000,00	0,00						
02.10	Alat - Alat Kesehatan									
6.3	<b>GOL. GEDUNG DAN BANGUNAN</b>									
03.12	Bangunan Gedung				36.870.364.000,00	13.388.583.863,32				
03.13	Rencana Monumen/Memorial									
03.14	Rencana - Rambu									
6.4	<b>GOL. JALAN, IRIGASI DAN JEMBRAN</b>									
04.13	Jalan dan Jembatan						228.593.436,00	108.012.000,00		
04.16	Bangunan Air Irigasi						0,00	0,00		
04.17	Jembatan						3.809.368.681,00	984.325.585,67		
04.18	Jembatan									
6.5	<b>GOL. ASSET TETAP LAINNYA</b>									
05.17	Relevansi Ekspektasi								446.857.100,00	
05.18	Bidang Berprestasi Kemajuan dan Lompatan								245.000,00	
05.19	Keunggulan Tertinggi dan Tambahan									
6.6	<b>GOL. KONSTRUKSI DAN PENGEHAAN</b>									0,00
06.00	Konstruksi dalam Pengerjaan									0,00
	Jumlah	2.130.000.000,00	8.534.282.186,65	2.294.219.879,01	36.870.364.000,00	13.388.583.863,32	4.123.973.317,00	1.091.877.585,67	446.857.100,00	0,00
	Jumlah Perapukan			6.428.961.353,85		23.481.780.592,88		1.033.859.731,81		
	Jumlah Nilai Buku	2.130.000.000,00		2.294.219.879,01		13.388.583.863,32		1.091.877.585,67	446.857.100,00	0,00

2. 3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Luas perairan Kabupaten Biak Numfor mencapai 19.592 km2 dengan potensi lestari sumberdaya perikanan (Maximum SustainableYield/MSY) sebesar 670.000 ton/tahun yang terdiri dari: Ikan Pelagis Besar 115.700 ton/thn, Pelagis Kecil 325.100 ton/thn, Ikan Demersal/dasar 194.400 ton/thn, Udang 18.700 ton/thn, Ikan Karang 16.100 ton/thn. Jumlah Produksi ikan dan hasil laut lainnya dari usaha perikanan rakyat selama tahun 2018 mencapai 80.662,5 ton dan perikanan darat mencapai 1,5 ton. Berdasarkan potensi perikanan tangkap yang melimpah tersebut, Kabupaten Biak Numfor ditetapkan sebagai salah satu kawasan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT). Untuk mendukung pengembangan kawasan SKPT maka pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan perhatian melalui pembangunan sarana dan prasarana perikanan diantaranya: pembangunan integrated cold storage (kapasitas 220 ton) serta bantuan sarana penangkapan ikan (perahu, motor tempel, freezer, coolbox) dan bibit ikan. Dalam upaya pengembangan kegiatan perikanan di kabupaten ini, telah dilakukan berbagai program untuk membantu para pelaku utama maupun pelaku usaha yang bergerak dibidang perikanan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan memfasilitasi baik sarana dan prasarana perikanan, alat penangkap dan pengumpul ikan

maupun pengolahan hasil perikanan. Tercatat sampai dengan tahun 2018, jumlah perahu tanpa motor yang ada di kabupaten Biak Numfor mencapai 5.012 unit, jumlah motor tempel 1.650 unit dan kapal motor 12 unit, yang berasal beberapa sumber alokasi dana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Papua, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Program Coremap CTI maupun swadaya masyarakat. Perkembangan jumlah alat penangkapan ikan dan pengumpul ikan yang banyak digunakan oleh masyarakat, yaitu jaring insang 9.045 unit, pancing 12.500, alat penangkap lainnya 1.500 dan rumpon 150 unit. Tingkat penerapan teknologi pada teknologi penangkapan ikan mencapai 60–85 persen untuk jenis alat tangkap jaring dan pancing dengan memperhatikan mutu air, setting, hauling, perakitan, perawatan, pasca panen dan pemasaran hasil. Tingkat penerapan teknologi budidaya ikan mencapai 60-85 persen pada kerambah dan kolam yang memperhatikan pemilihan bibit unggul, pengairan/debit air, pakan, pemeliharaan, kesehatan, pasca panen dan pemasaran hasil. Sedangkan, tingkat penerapan teknologi pengolahan ikan mencapai 25-80 persen pada pengolahan abon ikan, ikan asap, bakso ikan dan ikan asin dengan memperhatikan seleksi bahan baku, penanganan dan pengolahan, bahan bantu, bahan pengawet/kimia, pengemasan, penyimpanan dan distribusi/pemasaran. Dari pengolahan ikan asin, faktor penyimpanan dan distribusi masih rendah sehingga perlu ditingkatkan penerapan teknologi untuk memperlama daya simpan/awet dan mempermudah pemasaran yang ada. Dalam hal kelembagaan, jumlah kelembagaan Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha Perikanan di Kabupaten Biak Numfor sampai dengan tahun 2018 berjumlah 278 kelompok yang terdiri dari Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebanyak 240 kelompok, Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) sebanyak 30 kelompok dan Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan (POKLAHSAR) sebanyak 8 kelompok, dengan jumlah anggota per kelompok berkisar 10-25 orang. Perkembangan pemasaran hasil perikanan di Kabupaten Biak Numfor terdiri dari pemasaran lokal, pemasaran antar pulau maupun, ekspor terus mengalami peningkatan kuantatif menurut ekor maupun perkilogram. Komoditi perikanan yang dipasarkan antar pulau adalah ikan tuna segar, ikan cakalang segar, ikan kerapu segar, lobster hidup, kepiting hidup, teripang kering, gurita, ikan hias, bintang laut, ikan asin dengan daerah tujuan Makassar, Surabaya, Jakarta, Denpasar, Jayapura, Serui. Sedangkan yang diekspor melalui Denpasar adalah ikan hias spesies clown fish, later six, bintang laut dan ikan hias lainnya, dengan negara tujuan Singapura dan Malaysia.

**Tabel 2.3.1. produksi Perikanan Kabupaten Biak Numfor**

No	Tahun	Jumlah Produksi Tangkap (Ton)	Jumlah Produksi Budidaya (Ton)
1.	2014	46.957,3	9,6
2.	2015	55.871,6	11,7
3.	2016	62.738,2	10,5

4.	2017	76.662	16
5.	2018	82.656	32

Sumber: Dinas Perikanan Biak Numfor

**Tabel 2.3.2. Tingkat Konsumsi Ikan**

No	Tahun	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/th)
1.	2014	
2.	2015	
3.	2016	42
4.	2017	43.5
5.	2018	45.5

Sumber: Dinas Perikanan 2019

Tabel 2.3.3. Capaian Kinerja renstra 2014-2019

No	Indikator	Kondisi Awal 2013	Capaian Kinerja					Target Akhir 2019
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Meningkatnya Pendapatan Rata-rata Rumah Tangga Nelayan Perbulan (Rupiah)	700.000,-	800.000,-	900.000,-	1.000.000,-	1.100.000,-	1.250.000,-	1.200.000,-
1.	Jumlah Jenis Usaha /Produksi (Ton)	2.5	2.5	3	4.5	4	10	12.5
	➢ Rumput laut (Ha)							
	➢ Jaring Apung (Kerapu)	5	3,1	3,7	6	6	15	35
	➢ Teripang	3	4	5	-	6	7	8
1.	Jumlah dan Jenis Sarana Penangkapan (unit)							
	➢ Jaring Insang	8.435	2.907	8.530	8.606	8.800	9.045	8.935
	➢ Pancing	5.507	4.863	8.020	10.500	10.500	12.500	15.000
	➢ Alat penangkap Lainnya	1.865	1.894	1.898	1.901	1.901	2.000	2.000
	➢ Rumpon	50	60	80	80	112	150	200
1.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap yang bernilai Ekonomis (Ton/Tahun):							
	➢ Pelangis Besar	12.130	14.750	15.050	16.500	20.800	22.000	22.630
	➢ Pelagis Kecil	16.670	17.500	18.100	19.300	22.500	23.500	22.630
	➢ Ikan Demersal/Dasar	9.200	6.250	6.950	7.850	30.500	35.500	37.200
	➢ Udang	0,5	-	0,50		2,0	2,5	2,5
	➢ Ikan Karang	50	80	120	150	150	160	170

3.	Adanya Pelabuhan Perikanan Samudera (Unit)	0	0	0	0	0	0	1
4.	Berfungsinya Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) secara optimal (%)	40	45	48	50	75	80	100
1.	Kelompok Nelayan yang akan dilatih/dibina	50	30	23	40	130	120	150
1.	Frekuensi Patroli pengawasan Terpadu (kali/tahun)	10	10	10	10	6	-	24
1.	Persentase Tutupan Terumbu Karang	60	60	60	60	-	-	70
1.	Jumlah Kelompok Pengawas Masyarakat (POKMASWAS) (Kelompok)	15	5	8	10	29	-	30
1.	Adanya Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Jumlah Perda)	-	-	-	-	1	-	2



Tabel 2.3.4. Evaluasi Hasil Kinerja Renja Dinas selama lima (lima) Tahun 2014-2019

No	Urusan & Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program Outcome dan Kegiatan Output	Satuan	Target RENSTRA 2014-2019	Realisasi outcome program & output kegiatan			Tahun 2018	Perkiraan Realisasi	
					Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017		Realisasi Capaian Program &Kegiatan s/d 2018	Tingkat Capaian
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
A.	<b>Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran</b>									
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik		60	12	12	12	12	48	80%
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		60	12	12	12	12	48	80%
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan kantor		60	12	12	12	12	48	80%
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor		60	12	12	12	12	48	80%
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor		60	12	12	12	12	48	80%
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya keperluan barang cetakan dan penggandaan		60	12	12	12	12	48	80%

7	Penyediaan Makan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman		60	12	12	12	12	48	80%
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Meningkatnya kordinasi kerja antar daerah		60	12	12	12		48	80%
9	Penyediaan Administrasi Keuangan			60	12	12	12		48	80%
10	Penunjang Dana Alokasi Khusus	Adanya Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan kegiatan DAK		60	12	12	12	12	48	80%
11	Penyediaan Sarana Persewaan Mobilitas Darat dan Air	Tersedianya sarana dan persewaan mobilitas darat dan air		60	12	12	12	12	48	80%
<b>B</b>	<b>Progran Peningkatan Disiplin Aparatur</b>									
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian khusus dan hari-hari tertentu	pasang	300	-	100	100		200	67%
<b>C</b>	<b>Progran Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>									
1	Pendidikan PPNS bagi Pegawai DKP	Teraedianya aparatur yang dapat menyidik tindak pidana perikanan	orang	3	2				2	67%
2	Kursus/ Bintek	Teraedianya aparatur yang berkualitas		9	2	2	2		4	44%

<b>D</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan, Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>									
1	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		60	12	12	12	12	48	80%
<b>E</b>	<b>Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir</b>									
1	Pelatihan Managemen Wanita Pesisir	Peningkatan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	orang	750	150	150	150		450	60%
2	Pembuatan Tambatan kapal/perahu	tersedianya tambatan kapal/perahu diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	unit	10						0%
<b>F</b>	<b>Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut</b>									
1	Sosialisasi Penyadaran Masyarakat Dalam Upaya Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim Pada Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Peningkatan keterampilan masyarakat dalam upaya mitigasi	orang	200	60	60	60		120	60%
<b>G</b>	<b>Program peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim pada Masyarakat</b>									

1	Penyuluhan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim	Terlaksananya penyuluhan budaya kelautan dan wawasan maritim	orang	150	30	30	30		60	40%
2	Gerakan Bersih Pantai	Terlaksananya gerakan bersih pantai dalam budaya kelautan dan wawasan maritim	kali	5	1	1			2	40%
H	<b>Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan</b>									
1	Operasional Patroli Pengawasan Sumberdaya Alam dan Perikanan	terlaksananya pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya perikanan	kali	50	10	10	10		20	40%
2	Penunjang Coremap-CTI	Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuari, teluk dan coremap	Tahun	5	1	1			2	40%
I.	<b>Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut</b>									
1	Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	terlaksananya Sosialisasi UU Nomor 31 Tahun 2004 beserta perubahannya UU. Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan	orang	150	30	30	30		60	40%
2	Sosialisasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah	Terlaksananya sosialisasi dan penyadaran masyarakat patuh hukum	orang	150	30	30	30		60	40%

<b>J.</b>	<b>Pengadaan Perlengkapan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)</b>									
1	Pengadaan Motor tempel 15 PK	Terlaksananya Pengawasan oleh masyarakat dalam menjaga Sumberdaya Perikanan	unit	120	17	20			37	31%
2	Pengadaan Perahu Fiber	Terlaksananya Pengawasan oleh masyarakat dalam menjaga Sumberdaya Perikanan	unit	120	17	20			37	31%
3	Pengadaan sarana komunikasi Penunjang POKMASWAS (HT dan Perlengkapannya)	Tersedianya sarana komunikasi dalam mendukung pengawasan sumberdaya ikan	unit	11	37				37	336%
4	Pengadaan Bangunan Pengawasan SDKP	Tersedianya bangunan pengawasan sumberdaya ikan	unit	5	2				2	40%
<b>K</b>	<b>Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil</b>									
1	Pengadaan Kompresor Pengisian Alat Selam	Tersedianya sarana alat selam dinas	set	1	-	-	-		-	0%
2	Pelatihan Konsevasi Perikanan Berkelanjutan	Peningkatan kapasitas ekonomi Masyarakat	orang	150	30	30	30		90	60%
<b>L</b>	<b>Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan</b>									
1	Pelatihan Pengasapan Ikan	Peningkatan kapasitas pelaku usaha	orang	150	30	30	-		60	40%

2	Pelatihan Pengolahan Ikan	Peningkatan kapasitas pelaku usaha	orang	120	30	30	-	30	90	75%
3	Lomba Cipta Menu dan Bahan Baku Ikan	peningkatan kreatifitas dan inovasi dalam mengolah hasil perikanan	orang	150	30	30	30	30	120	80%
4	Temu Usaha Perikanan	terlaksananya temu usaha perikanan	orang	150	30	30	-		60	40%
5	Gemar Makan Ikan untk Balita (posyandu)	sosialisasi gerakan genar makan ikan bagi balita	orang	150	30	30	30		90	60%
<b>M.</b>	<b>Program Pengembangan Perikanan Tangkap</b>									
	Pengadaan tali rumpon	tersedianya tali rumpon	Gulung	300	50	50	97		197	66%
<b>N.</b>	<b>Pengadaan Sarana Penunjang Penangkapan</b>									
	Pengadaan motor tempel 15 PK	tersedianya motor tempel	unit	280	112	73	49	154	388	lebih 100%
	Pengadaan Perahu Fiber	Tersedianya Perahu Fiber	unit	280	23	23	49	154	249	89%
	Lampu Age Petromaks	Trsedianya penunjang penangkapan ikan	unit					59		penunjang
	Pengadaan Fish Finder	Trsedianya penunjang penangkapan ikan	unit					59		penunjang
	Pengadaaan cool box	Trsedianya penunjang penangkapan ikan	unit		125	116	142	59		penunjang
	Baterey Aki	Trsedianya penunjang penangkapan ikan	unit					59		penunjang

<b>O.</b>	<b>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b>									
	Pengadaan Pakan Ikan Kerapu	Tersedianya Pakan Ikan Kerapu	karung	3,000	700		700	700	2,100	70%
	Pelatihan Budidaya air tawar	adanya pelatihan petani ikan	orang	150	30	30	40	40	140	93%
	Pelatihan Pembuatan pakan ikan	adanya pelatihan petani ikan mengenai pakan ikan	orang	150	30	60	30		120	80%
	Pengadaan Bibit ikan kakap putih dan sejeinis kakap	tersedianya bibit ikan yang unggul	ekor	44,965	10,000	10,000	10,000		30,000	67%
	Pengadaan Bibit ikan kerapu	tersedianya bibit ikan unggul	ekor	44,965	10,000	10,000	10,000		30,000	67%
	Sarana Budidaya kepiting Bakau	Tersedianya sarana budidaya kepiting	kelompok							
	Pendamping tenaga Budidaya	adanya pendamping Perikanan Budidaya	orang	24	2	2	4	4	12	50%
	Pengadaan Karamba Jaring Apung	Tersedianya sarana Budidaya	kantung	150	40			40	80	53%

Tabel 2.3.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor

NO.	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN INI					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN		
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018			
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	620,910,000	861,496,70	1,502,694,000.	1,421,799,650.	599,835,000.	619,436,504.	777,595,180.	1,013,423,722.	1,058,723,975.	594,991,148	99.76	90.26	74.46	99.49	-	-		
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	-	100,000,000.	42,000,000			-	100,000,000.					100.	-	-	-	-		
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	-	64,500,000.	100,000,000	64,500,000		-	64,460,000.	99,770,000.	0.00			99.94	99.77	-	-	-		
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR		149,525,000	150,000,000				97,847,800.	114,560,000				65.44	76.37	-	-	-		



5	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			20,000,000					20,000,000.					100.00	-	-	-	
6	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN PENINGKATAN INVESTASI			200,000,000					194,461,800					97.23				
7	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	20,000,000.00	19,350,000		25,000,000	15,000,000	20,000,000.	19,350,000.		25,000,000	15,000,000	100.	100.	-	-	100.00	100.00	-
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR	725,000,000.00	320,800,000	1,120,000,000	675,000,000	150,000,000	718,300,000.	196,426,000.	1,015,989,600.	643,256,251	149,443,400	99.08	61.23	61.23	90.7	99.63	-	-
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN	2,726,000.00.	19,340,741,3	300,000,000	250,000,000		2,390,941,000.	18,174,336,866.	300,000,000	143,400,000		87.71	93.97	100.00	57.36			

Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan

10	PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAA N SUMBERDAYA LAUT	2,399,950,0 00.	2,042,400,0	447,250,000	1,530,000,000		2,391,423, 727.	1,587,770,00 0.	447,250,000 .	1,404,089,0 00		99.64	77.74	100.0 0	91.77				
11	PROGRAM PENINGKATAN MITIGASI BENCANA ALAM LAUT DAN PRAKIRAAN IKLIM LAUT	-	102,000,000. 00					102,000,000.					100.00	--	--	--			
12	PROGRAM PENGEMBANGA N BUDIDAYA PERIKANAN	5,059,500,0 00.	2,359,072,00 0	805,000,000	1,081,072,000	3,849,990,00 0	5,002,430, 000.	2,219,340,00 0.	730,292,000 .	550,072,500	3,517,343,5 00	98.87	94.08	90.72	50.88	91.36			
13	PROGRAM PENGEMBANGA N PERIKANAN TANGKAP	4,626,500,0 00.	9,627,722,80 0	4,649,000,0 00	4,537,618,336	11,386,358,2 70	4,622,651, 000.	9,415,071,60 7.	3,745,400,4 20	4,038,395,0 00	11,021,481, 900	99.92	97.79	80.56	89.00	96.80			
14	PROGRAM PENGEMBANGA N SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN	2,049,000,0 00.	605,000,000	159,000,000			2,023,862, 364.	465,576,249.	159,000,000			98.77	76.95	100.0 0	-	-	-		

**Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan**

15	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	4,700,799,528.	3,480,750,000	2,402,370,000	1,465,000,000		3,558,903,000.	3,448,831,450.	1,950,234,400.00	922,205,000		75.71	99.08	81.18	62.95				
16	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PENGWASAN PRODUKSI PERIKANAN	-	-	2,820,000,000					1,721,490,100.					61.05					
17	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN	3,195,950,000.					2,885,041,000.					90.27							
18	PROGRAM PENYEDIAAN DATA STATISTIK KELAUTAN DAN PERIKANAN	170,104,000					170,058,000.					99.97							
19	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	693,000,000					533,854,964.					77.04							
25	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN			70,000,000					70,000,000					100.00					

**Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan**

26	PROGRAM PENYEDIAAN SARPRAS PERIKANAN TANGKAP			415,000,000					315,000,000					75.90	-	-	-		

## **2. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan**

Tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor dapat dilihat dengan melakukan Analisa Lingkungan Eksternal (ALE) yaitu dilakukan dengan pencermatan terhadap lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan :

### **b. Peluang (Opportunities)**

1. Tersedianya sumber daya Dinas Perikanan yang sangat besar dengan luas wilayah perairan 19.591.63 Km<sup>2</sup>
2. Letak geografis yang berhadapan langsung dengan lautan fasifik
3. Tersedianya lahan budi daya laut, tawar ataupun air payau yang cukup luas
4. Besarnya potensi pasar hasil produksi Perikanan di tingkat lokal, domestik dan ekspor
5. Kehadiran kemitraan (investor) di bidang penangkapan dan budidaya
6. Masih kuatnya rasa kebersamaan dan gotong royong di masyarakat.

### **b. Tantangan / Ancaman (Threats)**

1. Masih rendahnya pengetahuan serta keterampilan masyarakat dibidang kelautan dan perikanan.
2. Masih terdapat nelayan yang menggunakan alat penangkapan yang dapat merusak ekosistem.
3. Tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang semakin tinggi.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana tangkap dan budidaya.
5. Pengelolaan budidaya baik air tawar maupun air laut belum berorientasi bisnis
6. Belum optimalnya penerapan teknologi penangkapan ikan dan budidaya yang menyebabkan rendahnya produktifitas dan mutu.
7. Illegal fishing.
8. Konflik penggunaan ruang
9. Kondisi sosial ekonomi yang kurang kondusif.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan**

Isu-isu strategis diperoleh dari identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat baik internal maupun eksternal yang dapat menciptakan peluang dan ancaman dimasa lima tahun mendatang. Hasil dari identifikasi tersebut adalah :

Faktor Pendorong :

- a) Potensi SDA dan SDM dibidang perikanan cukup besar
- b) Ketersediaan lahan untuk perikanan air tawar dan payau
- c) Keuletan nelayan yang cukup tinggi
- d) Sumber ikan laut yang melimpah
- e) Produk-produk perikanan yang bernilai ekonomis
- f) Tersedianya lembaga perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk pengembangan IPTEK bagi masyarakat perikanan
- a) Terbukanya kerjasama dengan pihak investor
- b) Letak geografis yang sangat menguntungkan
- c) Kebutuhan bahan pangan protein yang semakin meningkat

Faktor Penghambat :

- a) Kepemilikan modal rendah;
- b) Pemasaran hasil yang belum optimal;
- c) Ketersediaan bibit ikan terbatas;
- d) Kemampuan sumber daya manusia belum optimal;
- e) Belum tersedianya dermaga untuk perahu nelayan dengan kapasitas besar;
- f) Sarana dan prasarana penangkapan ikan belum memadai;
- g) Belum optimalnya peran Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan;
- h) Perubahan iklim yang tidak menentu yang dapat mengganggu aktivitas nelayan;
- i) Iklim yang tidak menentu berpengaruh pada produktifitas hasil tangkapan dan Budidaya.

Dinas Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor telah merumuskan faktor kunci pembangunan Dinas Perikanan yang dapat menjadi isu-isu strategis, yakni :

Potensi SDA dan SDM di Kabupaten Biak Numfor cukup besar khususnya dibidang perikanan, hal ini belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga merupakan peluang untuk dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi yang tepat dan penggunaan input yang memadai tanpa mengesampingkan kelestarian sumberdaya alam.

Wilayah laut dan darat merupakan potensi untuk pengembangan perikanan dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat

Produk-produk perikanan yang bernilai ekonomis, jika dikelola secara profesional akan mampu berperan dalam menyerap tenaga kerja yang ada serta mampu menyediakan kebutuhan produk perikanan, dan dapat meningkatkan konsumsi ikan

Tersedianya lembaga perguruan tinggi dan lembaga penelitian merupakan peluang untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi bagi kepentingan masyarakat perikanan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor mengalami beberapa permasalahan bagi perwujudan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor yaitu sebagai berikut :

- a) Kemampuan staf dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis belum merata.
- b) Jumlah personil belum seimbang dengan beban tugas.
- c) Masih kurangnya data yang dibutuhkan untuk perencanaan teknis.
- d) Jumlah sarana dan prasarana penunjang kerja belum optimal.
- e) Rendahnya kemampuan fiskal daerah dan minimnya anggaran Dinas Perikanan
- f) Masih kurangnya koordinasi antar bidang.
- g) Belum adanya sistem dan prosedur kerja yang memadai.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dirumuskan sebagai berikut :

**“BIAK NUMFOR YANG RELIGIUS, BERKARAKTER DAN BERBUDAYA  
SEBAGAI SUMBU PERTUMBUHAN YANG BERDAYA SAING MENUJU  
KESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN”**

Asumsi dasar Visi Pembangunan dimaknai sebagai berikut :

#### **Religius**

Pemerintah daerah Kabupaten Biak, tentunya menginginkan setiap individu atau masyarakat di daerahnya memiliki sikap religious dan juga dapat menerapkan nilai-nilai religious. Kata religious bermakna religi yang berasal dari bahasa asing religion sebagai kata bentuk dari kata benda yang berarti agama. Agama mempunyai arti: Percaya kepada Tuhan atau kekuatan super human atau kekuatan yang di atas dan di sembah sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta, Ekspresi dari kepercayaan di atas berupa amal ibadah, dan suatu keadaan jiwa atau cara hidup yang mencerminkan kecintaan atau kepercayaan terhadap Tuhan, kehendak, sikap dan perilakunya sesuai dengan aturan Tuhan yang akan tampak dalam kehidupan kesehariannya. Religius yang diwujudkan melalui sikap religious masyarakat di Kabupaten Biak Numfor.

### **Berkarakter**

Masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang berkarakter yaitu masyarakat yang menerapkan nilai-nilai kepribadian yang terpatri dalam diri melalui pendidikan, pengalaman, percobaan, pengorbanan dan pengaruh lingkungan yang dipadu dengan nilai-nilai yang berasal dari dalam diri individu atau masyarakat dalam system daya juang yang akan melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku dalam bertindak.

### **Berbudaya**

Dalam terminologi bahasa Indonesia istilah budaya diartikan sebagai : 1) pikiran akal budi: hasil budaya; 2) adat istiadat: menyelidiki bahasa dan budaya; 3) sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju): jiwa yang budaya; 4) sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah. Sedangkan istilah

kebudayaan diartikan sebagai ; 1) hasil kegiatan dan penciptaan bathin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. 2) antar keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya.

### **Sumbu Pertumbuhan**

Dalam konteks regional, istilah sumbu pertumbuhan juga dapat diartikan sebagai simpul atau kutub pertumbuhan. Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Biak Numfor diharapkan dapat mengembangkan dan mempercepat daya saing serta laju pertumbuhan yang kuat dalam perekonomian wilayah dan dapat mendorong perkembangan wilayah disekitar yang relatif belum berkembang. Kabupaten Biak, dalam era globalisasi dan perdagangan bebas yang sangat kompetitif akan menghadapi tantangan berat dalam merumuskan kebijakan pembangunan ke depan agar mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder serta tersier penduduknya.

### **Berdaya saing**

Daya saing merupakan salah satu kriteria untuk menentukan keberhasilan dan pencapaian sebuah tujuan yang lebih baik oleh suatu daerah dalam upaya peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Daya saing diidentifikasi dengan masalah produktifitas dan efisiensi, yaitu dengan melihat tingkat output yang dihasilkan untuk setiap input yang digunakan. Artinya untuk meningkatnya produktifitas perlu ditunjang oleh peningkatan jumlah input fisik modal, tenaga kerja dan peningkatan kualitas input yang digunakan serta peningkatan teknologi.



## **Kesejahteraan**

Kesejahteraan dalam istilah umum menunjuk ke keadaan yang baik, aman sentosa dan makmur; bahagia dan selamat (terlepas darisegala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya), dan ketentraman hidup. Kesejahteraan (welfare) adalah kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau masyarakat baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga tercapai kesejahteraan hidup (well being) dan kesejahteraan psikologis. Kesejahteraan hidup (well being) adalah sebuah kondisi dimana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan sendiri dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat menciptakan dan mengatur lingkungan yang kompatibel dengan kebutuhannya, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Sedangkan kesejahteraan psikologis adalah kebaikan, keharmonisan, menjalin hubungan baik dengan orang lain baik antar individu maupun dalam kelompok. masyarakat yang sejahtera secara psikologis adalah kondisi individu atau masyarakat yang ditandai dengan adanya perasaan bahagia, memiliki kepuasan hidup dan tidak ada tanda-tanda depresi. Kesejahteraan juga dapat dimaknai dalam konteks daerah yang bisa di ukur melalui dimensi moneter maupun non moneter, misalnya ketimpangan distribusi pendapatan, yang didasarkan pada perbedaan tingkat pendapatan penduduk di suatu daerah. Kemudian masalah kerentanan (vulnerability), yang merupakan suatu kondisi dimana peluang atau kondisi fisik suatu daerah yang membuat seseorang menjadi miskin atau menjadi lebih miskin pada masa yang akan datang. Hal ini merupakan masalah yang cukup serius karena bersifat struktural dan mendasar yang mengakibatkan risiko-risiko sosial ekonomi dan akan sangat sulit untuk memulihkan diri (recover). Kerentanan merupakan suatu dimensi kunci dimana perilaku individu dalam melakukan investasi, pola produksi, strategi penanggulangan dan persepsi mereka akan berubah dalam mencapai kesejahteraan.

## **Kemandirian**

Kemandirian adalah suatu sikap yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maupun berpikir dan bertindak original/kreatif, dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungan, mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya. Istilah kemandirian menunjukkan adanya kepercayaan akan sebuah kemampuan diri dalam menyelesaikan masalah tanpa bantuan dari orang lain.

Dengan demikian maka perwujudan dari Biak Numfor yang Religius, Berkarakter dan Berbudaya Sebagai Sumbu Pertumbuhan yang Berdaya Saing Menuju Kesejahteraan dan Kemandirian yaitu masyarakat Biak Numfor yang memiliki iman, dapat menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, dan berahlak mulia, jujur, toleransi, disiplin, bekerja keras, mandiri, demokratis, memiliki rasa ingin tahu, memiliki semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli

sosial dan bertanggung jawab yang tidak hanya semata-mata untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk masyarakat sekitarnya, bahkan juga untuk makhluk lain ciptaan Tuhan. Masyarakat Biak Numfor yang memiliki kebijakan-kebijakan pembangunan yang tepat, kelembagaan yang sesuai, serta pemanfaatan keunggulan ekonomi lainnya guna mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dan berdaya saing dengan menyediakan suatu iklim investasi dan aktivitas ekonomi yang kondusif untuk mempertahankan daya saing domestik maupun global dan memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada pemerintah dan juga kepercayaan investor dengan aktivitas ekonomi yang dilakukan berbasis sumber daya sehingga dapat bersaing di pasar regional dan pasar internasional dan dapat menciptakan kondisi terjadinya *trickledown effect* (dampak peneteskan ke bawah) dan kondisi *spread effect* (dampak penyebaran) pertumbuhan ekonomi dari perkotaan ke pedesaan secara berkelanjutan, sehingga masyarakat Kabupaten Biak Numfor terpenuhi semua kebutuhan dasar bagi individu atau masyarakat baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga tercapai kesejahteraan hidup (*well being*) dan kesejahteraan psikologis serta memiliki kemampuan psikososial yang mencakup kebebasan untuk bertindak, tidak tergantung dengan kemampuan orang lain, tidak terpengaruh lingkungan, dan bebas mengatur kebutuhannya sendiri.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan tersebut maka ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan yang akan menjadi acuan dalam penyusunan kerangka kerja agenda pembangunan yaitu :

- 1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel;
- 2) Meningkatkan Perekonomian Daerah dengan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan;
- 3) Mewujudkan Kualitas SDM yang Cerdas, Inovatif dan Kreatif;
- 4) Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat;
- 5) Meningkatkan Suasana Aman dan Damai Dalam Masyarakat dilandasi Nilai Keagamaan dan Nilai Adat Istiadat;
- 6) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

Untuk mencapai visi dan misi ditetapkan tujuan dan sasaran. Pengembangan visi dan misi menjadi tujuan dan sasaran tidak terlepas dari dukungan Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perwujudan misi yang telah diuraikan diatas, akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Dari urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran.

**Tabel 3. 1. Tujuan dan Sasaran Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023**

Misi	Tujuan	Sasaran	
<b>Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah</b>	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pendayagunaan potensi sumberdaya alam secara berkelanjutan	
		Meningkatnya Pembangunan ekonomi Maritim dan Kelautan	
		Terwujudnya struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada ekonomi kreatif dan UMKM	
	Meningkatkan Potensi Kawasan Strategis dalam dalam memajukan sektor Perdagangan dan Investasi	Meningkatnya skala Usaha jasa perdagangan	
		Meningkatnya daya saing dan investasi antar wilayah	
		Bertumbuhnya iklim investasi pada sektor-sektor unggulan daerah	
	Meningkatkan Keunggulan dan Daya Tarik Promosi Wisata	Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata bagi masyarakat	
		Pngembangan pariwisata dan prouk wisata (alam, budaya, sejarah	
	<b>Meningkatkan Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia</b>	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu penyelenggaraan pendidikan
			Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat
Terwujudnya Biak Numfor sebagai Kota Tujuan Belajar Wilayah Saireri dan Papua			
Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyakat		Meningkatkan derajat dan akses kesehatan masyarakat	
		Meningkatnya kualitas manajemen Rumah Sakit dan Puskesmas	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan perilaku hidup bersih dan sehat	
Meningkatkan Partisipasi dan Peran Pemuda dalam Pembangunan		Meningkatnya pembinaan bagi pemuda	
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah sosial	
		Meningkatnya kesempatan kerja	
		Meningkatnya daya saing tenaga kerja	

Misi	Tujuan	Sasaran
	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Soial dan Religiustas Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya	Meningkatnya pelayanan sosial dan keagamaan kepada masyarakat Meningkatkan suasana damai dan kepastian hukum Terwujudnya proteksi terhadap nilai-nilai adat dan budaya asli Biak
<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Brwibawa, Bersih dan Profesional, Berorientasi ke Pelayan Publik yang Prima</b>	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Tersedianya sumberdaya manusia aparatur yang baik, bersih dan disiplin
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
		Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan daerah
		Meningkatnya system akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah
Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah
		Meningkatnya pengarusutmaan gender dalam pembangunan daerah dan upaya perlindungan anak
<b>Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan dan Tata Ruang</b>	Mewujudkan Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrasktruktur Daerah Guna Menopang Perkembanan Wilayah dan Pertumbuhan Ekonomi	Pembangunan akses transportasi dalam mendukung pengembangan ekonmi wilayah kepulauan
		Implementasi Rencana Tata Ruang Wilatyah secara konsisten
		Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman
		Meningkatnya ketersediaan energi terbarukan
		Meningkatnya jangkuan pelayanan sitem komunikasi dan informasi antar wilayah
	Mewujudkan Kesadaran Pengelolaan Lingkungan Dalam Pembangunan	Meningkatnya Pemahaman Politik Masyarakat Biak

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Perencanaan strategis tentunya tidak hanya mempertimbangkan rencana di tingkat Kabupaten saja melainkan harus mempertimbangkan apa yang telah direncanakan ole tingkat pemerintahan propinsi maupun pemerintah pusat. Adapun permasalahan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Renstra Kementerian Perikanan/Lembaga dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Penanganannya**

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kab.Biak Numfor	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan	Masih Kurangnya sarana dan prasarana Penangkapan ikan yang memadai	Penangkapan ikan masih menggunakan peralatan yang sederhana dan kapasitas dan daya jelajah masih terbatas	Pemberian bantuan alat penangkapan, sarana alat bantu penangkapan yang memadai (perahu, mesin, dan alat bantu lainnya) yang dibutuhkan sesuai tujuan penangkapan
		Produksi Budidaya Ikan masih sangat rendah	Masih kurangnya gairahnya pembudidaya ikan tawar dan laut dalam mengembangkan usaha budidaya	Penyuluhan dan sosialisasi teknik Budidaya termasuk cara penanganan hama dan penyakit
			Kurang tersedianya benih ikan unggul	Bantuan peralatan dan benih ikan unggul
2.	Meningkatnya pendapatan	Tingginya biaya operasional baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap dibanding dengan harga hasil budidaya dan penangkapan ikan yang fluktuatif	Belum maksimalnya pemberian bantuan maupun subsidi guna menekan tingginya biaya operasional	Kuota subsidi bbm untuk nelayan ditingkatkan
				Pemberian bantuan freezer bagi nelayan
				Bantuan pakan ikan
		Terbatasnya akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan	Masih rendahnya tingkat kepercayaan perbankan terhadap pelaku usaha perikanan	Soialisasi kepada pelaku usaha perikanan dan Perbankan
				Pelatiha manajemen usaha kepada pelaku usaha perikanan

3.	Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan	Masih belum optimalnya konsumsi ikan di masyarakat	Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya manfaat mengkonsumsi ikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerakan Gemar Ikan,</li> <li>- Lomba Cipta Menu Kreasi Ikan</li> <li>- Pembentukan Forum Forikan</li> </ul>
4.	Meningkatnya mutu keamanan produk perikanan sesuai standar	Masih rendahnya mutu dan keamanan produk olahan hasil perikanan	Masih kurangnya bimtek dan pelatihan mengenai cara penanganan dan pengolahan hasil perikanan yang baik dan benar	Fasilitasi terhadap pengolah ikan untuk memperoleh perizinan P-IRT dan sertifikat Halal
		Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan para pelaku usaha pengolahan ikan dalam diversifikasi hasil olahan produk perikanan	Masih kurangnya Pelatihan dalam inovasi dan diversifikasi hasil olahan	Pelatihan keragaman hasil Produksi olahan Perikanan
5.	Terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan	Masih terjadi Penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan	Masih rendahnya kesadaran dan kurangnya pengawasan	Koodinasi dengan Pihak Keamanan dan Dinas KP Provinsi dan Satsion PDSKP Kementerian RI
			Kewenangan dalam melakukan kegiatan dari 0 - 12 Mil	Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku

Keterkaitan degan Visi dan Misi RPJMD Provpinsi Papua

**Tabel 3. 3. Keterkaitan degan Visi dan Misi RPJMD Provpinsi Papua**

**Visi dan Misi RPJMD Provinsi Papua , Visi : “Papua Yang Mandiri Secara Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik”**

**Misi 4 : Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural dan Berkelanjutan**

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi
	<b>Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan</b>	Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah di sektor tanaman pangan/perkebunan/peternakan dengan mutu serta kualitas prima</li> <li>2. Peningkatan produktivitas tanaman pangan/perkebunan/peternakan melalui penerapan teknologi, serta fasilitasi pemasaran</li> <li>3. Peningkatan ketahanan pangan di</li> </ol>

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi
			<p>tingkat provinsi yang berbasis penganekaragaman komoditas pangan local</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. <b>Peningkatan dan pemenuhan infrastruktur pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</b></li> <li>5. Perbaiki sistem distribusi dan logistik komoditas tanaman pangan/perkebunan/peternakan termasuk pergudangan secara terintegrasi dengan memperhatikan supply chain</li> <li>6. Menjaga nilai tukar dan daya beli petani, peternak, dan nelayan (BULOG Provinsi)</li> <li>7. Pengembangan industri hilir tanaman pangan/ perkebunan/ peternakan melalui insentif pengembangan</li> <li>8. Penelitian dan pengembangan bibit unggul, dan penyuluhan untuk penggunaan secara tepat dan akurat dengan resiko yang dapat dijaga</li> <li>9. Pembangunan dan pengembangan klaster ekonomi berbasis wilayah adat dengan komoditi lokal unggulan</li> <li>10. Penguatan kelembagaan ekonomi petani/peternak untuk peningkatan produktifitas dan pemasaran dalam perekonomian masyarakat lokal.</li> <li>11. Menyiapkan Sarana dan Prasarana Ekonomi Berbasis Keunggulan komoditas tanaman pangan/perkebunan/peternakan masing-masing Wilayah (mendukung pelaksanaan PON XX tahun 2020)</li> <li>12. Memantapkan hubungan antar wilayah/daerah/kampung dengan membangun infrastruktur dan keterkaitan sistem produksi dan distribusi komoditas pertanian dan perkebunan, serta pelayanan yang kokoh serta berkesinambungan.</li> <li>13. Penguatan kemandirian kampung untuk pemenuhan kebutuhan pangan (menghindari ketergantungan dari luar)</li> <li>14. Mengembangkan jaringan dan informasi pasar lokal untuk komoditas unggulan pertanian/perkebunan/peternakan di tiap wilayah</li> </ol>

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi
			15. Peningkatan agroindustri lokal yang mampu mendorong perkembangan kemandirian ekonomi masyarakat dan daerah 16. Perbaikan iklim Investasi dan usaha dengan pemihakan kepada sektor UMKM agribisnis sebagai tiang penyerap tenaga kerja terutama OAP. 17. Pengembangan industri pertanian/perkebunan/peternakan padat karya

**Tabel 3. 4. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan (RPJMD Provinsi Papua 2018-2023)**

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan sektor perikanan dan kelautan yang berkelanjutan	1. Belum optimalnya produktifitas regional sektor perikanan dan kelautan dalam perekonomian wilayah	1. Belum optimalnya produksi budidaya perikanan air tawar 2. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap 3. Rendahnya kontribusi sektor industri berbasis perikanan terhadap perekonomian daerah 4. Masih terbatasnya teknologi perikanan tangkap dan budidaya 5. Belum optimalnya penyediaan benih/bibit unggul dan pusat pembibitan ikan 6. Keterbatasan sarana dan prasarana produksi budidaya ikan air tawar 7. Meningkatnya pemukiman masyarakat di daerah tangkapan sumber air baku 8. Rendahnya kontribusi koperasi dan UKM sektor perikanan terhadap perekonomian daerah 9. Belum memadainya kelembagaan kelompok nelayan 10. Rendahnya kualitas SDM dan jumlah penyuluh perikanan tangkap 11. Masih rendahnya kualitas infrastruktur dan sarana prasarana pendukung produksi perikanan 12. Belum memadainya kelembagaan kelompok pembudidaya ikan tawar 13. Rendahnya kualitas SDM dan jumlah penyuluh perikanan tangkap



### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Kabupaten Biak Numfor terletak di sebelah utara daratan Papua, tepatnya di Teluk Cendrawasih. Secara astronomi terletak pada 0° 55'–1° 27' Lintang Selatan dan 134° 47'–136° Bujur Timur. Kabupaten ini terdiri dari dua pulau besar, yaitu Pulau Biak dan Pulau Numfor, serta sekitar 42 pulau-pulau kecil di Kepulauan Padaido.

#### ➤ **Perwilayahan Pembangunan**

Perwilayahan pembangunan dilaksanakan sebagai penjabaran strategi keterpaduan antar sektor yang dapat menjamin peningkatan efisiensi dan efektifitas pembangunan. Didalam Struktur susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi.

#### **A. Perkotaan**

Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang secara umum terdiri atas :

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di wilayah kabupaten;
- b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di wilayah kabupaten;
- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada di wilayah kabupaten;
- d. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang berada di wilayah kabupaten;
- e. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:
  - Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala distrik atau beberapa desa/kampung dan;
  - Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa/kampung.

Rencana sistem pusat kegiatan Kabupaten Biak Numfor, terdiri atas :

#### **1. PKNp/PKW: Biak (Distrik Biak Kota), Samofa (Distrik Samofa).**

PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Dalam PP No. 27/2008 tentang RTRWN, Biak ditentukan sebagai PKW. Karena potensi serta prospek perkembangannya, dalam draft RTRW Provinsi Papua, perkotaan Biak diusulkan menjadi PKNp. PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Internasional, Nasional, atau beberapa Provinsi.

Biak sebagai PKW merupakan pusat dari SWP III Provinsi Papua dengan wilayah pengembangan Kabupaten Supiori, Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Waropen.

2. **PKLp:** Yemburwo (Distrik Numfor Timur), Orkhdori (Distrik Swandiwe), Andei (Distrik Biak Utara), Yomdori (Distrik Biak Barat), Pasi (Distrik Aimando).

PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa distrik. Beberapa distrik di Kabupaten Biak Numfor diusulkan menjadi PKL, sesuai potensi dan prospek pengembangan masing-masing :

- ❖ Yemburwo: memiliki bandara, yang merupakan prasarana transportasi utama penghubung Pulau Numfor dengan Pulau Biak.
- ❖ Orkhdori: merupakan distrik perbatasan dengan Kabupaten Supiori, sehingga pertumbuhannya perlu didorong agar mengimbangi perkembangan yang berlangsung di Kabupaten Supiori.
- ❖ Yomdori dan Pasi: memiliki pelabuhan sebagai prasarana transportasi angkutan orang dan barang, penghubung Kepulauan Padaido dengan Pulau Biak.

3. **PPK:** Sandauw (Distrik Bruyadori), Yereboy (Distrik Warsa), Yendidori (Distrik Yendidori), Wadibo (Distrik Oridek).

PPK merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala distrik atau beberapa kampung. Sebagai PPK, perkotaan Sandauw, Yeruboy, Yendidori, dan Wadibu tidak memiliki fasilitas prasarana transportasi penting (kecuali Sandauw yang memiliki pelabuhan, yaitu Pelabuhan Manggari) dan sarana perdagangan dalam skala kabupaten. Namun perkotaan tersebut memiliki fasilitas permukiman yang dapat melayani kegiatan skala distrik atau beberapa kampung, seperti fasilitas pendidikan serta fasilitas kesehatan.

4. **PPL:** Kansai (Distrik Numfor Barat), Rawar (Distrik Orkeri), Andei (Distrik Poiru), Bosnik (Distrik Biak Timur), Roidifu (Distrik Andey Dalam), Soor (Distrik Yawosi), Sansudi (Distrik Bondifuar), Pai (Distrik Padaido). Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar kampung.

Pusat-pusat pelayanan di PPL memiliki fasilitas permukiman dasar (sarana pendidikan dan kesehatan) yang dapat melayani kegiatan skala antar kampung. Pusat pelayanan di Distrik Yawosi dari Yawosi dipindahkan ke Soor, dikarenakan faktor fisik dasar dan pencegahan terhadap terjadinya bencana.

## **B. Perkampungan**

Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Geolokasi kampung menjadi aspek penting dalam rencana tata ruang

wilayah di Provinsi Papua, mengingat bahwa kampung merupakan representasi keberadaan masyarakat adat.

Berdasarkan SK Bupati Biak Numfor No. 146/678 tentang Wilayah Administrasi, jumlah kampung di Kabupaten Biak Numfor berjumlah 195 kampung (dan kelurahan), tetapi hanya 145 kampung yang diketahui koordinatnya.

### **C. Sistem Perwilayahan**

Karakter perkembangan wilayah di Kabupaten Biak Numfor cenderung linier, mengikuti kawasan pesisir, dimana antara wilayah pesisir timur dan pesisir barat dipisahkan oleh kawasan hutan dibagian tengahnya. Sistem jaringan jalan juga berpola mengikuti perkembangan kawasan permukiman.

Berdasarkan kondisi geografis seperti di atas serta hierarki pusat-pusat kegiatan maka rencana sistem perwilayahan di Kabupaten Biak Numfor dapat dilihat pada Rencana Struktur Ruang, serta penjelasan rencana sistem perwilayahannya dijelaskan sebagai berikut :

1. SSWP I
  - Pusat kegiatan : perkotaan Biak.
  - Wilayah pelayanan : Distrik Samofa, Distrik Biak Kota, Distrik Biak Timur, dan Distrik Oridek.
  - Kegiatan utama : perdagangan dan jasa (komersial, sosial, pemerintahan), industri, transportasi, konservasi, pariwisata, kehutanan, pertanian, Dinas Perikananserta permukiman.
2. SSWP II
  - Pusat kegiatan : perkotaan Yomdori .
  - Wilayah pelayanan : Distrik Biak Barat, Distrik Yendidori.
  - Kegiatan utama : transportasi, kehutanan, pertanian, Dinas Perikananserta permukiman.
3. SSWP III
  - Pusat kegiatan : perkotaan Andei.
  - Wilayah pelayanan : Distrik Warsa, Distrik Yawosi, Distrik Andey Dalam, Distrik Biak Utara.
  - Kegiatan utama : konservasi, kehutanan, kelautan dan perikanan, pertanian, permukiman, transportasi.
4. SSWP IV
  - Pusat kegiatan : perkotaan Orkhdori  
Orkhdori merupakan pusat kegiatan dengan fasilitas minimum dibanding dengan pusat-pusat kegiatan yang lain. Mengingat bahwa orkhdori berada di kawasan perbatasan dengan Kabupaten Supiori maka perkembangan Orkhdori perlu menjadi prioritas dalam rencana pembangunan struktur ruang.
  - Wilayah pelayanan : Distrik Swandiwe, Distrik Bondifuar.
  - Kegiatan utama : kehutanan, kelautan dan perikanan, serta permukiman.

5. SSWP V

- Pusat kegiatan : perkotaan Yemburwo
- Wilayah pelayanan : Distrik Numfor Timur, Distrik Poiru, Distrik Bruyadori, Distrik Orkeri, Distrik Numfor Barat.
- Kegiatan utama : kelautan dan perikanan, kehutanan, pariwisata, transportasi, dan permukiman.

6. SSWP VI

- Pusat kegiatan : perkotaan Pasi
- Wilayah pelayanan : Distrik Padaido, Distrik Aimando.

Kegiatan utama : konservasi, kelautan dan perikanan, pariwisata, kehutanan, dan permukiman.

### **3.4 Penentuan Isu – Isu Strategis**

#### **❖ Metode Penentuan Isu-Isu Strategis**

Pengertian isu kritical/strategis adalah “kebijakan fundamental atau perhatian program yang menentukan situasi yang sangat penting, dan pilihan-pilihan yang dihadapi organisasi pada waktu sekarang dan di masa depan. Isu-isu kritical/strategis menceminkan persoalan-persoalan yang berkepanjangan dalam organisasi, komunitas yang dilayani atau kegiatan-kegiatan sekarang yang diantisipasi mempunyai dampak yang sangat nyata pada organisasi dan/atau komunitas yang dilayani” (Martinelli 1999). Secara singkat, isu strategis adalah persoalan-persoalan yang memiliki dampak signifikan terhadap masalah Dinas Perikanan yang mungkin untuk diselesaikan dalam kurun waktu perencanaan. Situasi dan kondisi lingkungan eksternal dan internal SKPD Dinas Perikanan dapat menjadi isu yang penting untuk diperhatikan dan menjadi isu yang kritis/strategis. Dalam perumusan isu strategis, perlu memperhatikan antara lain:

- a. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Dinas Perikanan dan penataan ruang.
- b. Penyerahan urusan pemerintah bidang Perikanan yang menjadi urusan daerah.
- c. Visi misi kepala daerah terpilih
- d. Rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang masih berlaku
- e. RPJM Daerah dan RPJM Daerah yang masih berlaku
- f. Pencapaian kinerja Renstra SKPD Dinas Perikanan terdahulu.

#### **❖ Isu-Isu Strategis Bidang Perikanan**

Berdasarkan hasil rumusan faktor-faktor yang mendukung (peluang dan potensi) maupun yang menghambat (kelemahan dan tantangan), maka dirumuskanlah isu-isu strategis bidang Dinas Perikanan yaitu :

- a. Pelayanan infrastruktur dasar berupa kondisi ketersediaan prasarana dan sarana (kuantitas, kualitas, fungsional) sebagai amanat PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- b) Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja aparatur Dinas Perikanan melalui reformasi birokrasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas birokrasi serta mewujudkan disiplin dan etos kerja yang prima.

- c) Hasil pembangunan harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat secara aman dan nyaman bagi semua golongan masyarakat terutama penduduk asli Papua, termasuk golongan masyarakat dengan kebutuhan khusus (*special needs*) seperti lansia, anak-anak, dan difable.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi dijelaskan sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas SDM, pemahaman, kesadaran, kepedulian dan partisipasi masyarakat
2. Rendahnya Pendapatan masyarakat pesisir
3. Rendahnya kualitas dan daya saing produk-produk perikanan
4. Rendahnya akses permodalan dan pemasaran produk-produk perikanan
5. Lemahnya Penataan dan Penegakan Hukum
6. Kurang tersedianya sistem informasi dan manajemen database pengelolaan kelautan dan perikanan
7. Terbatasnya Sarana dan Prasarana penunjang perikanan tangkap, budidaya dan Pengolahan hasil Produk Perikanan
8. Peralatan penangkapan ikan yang dimiliki masih sederhana
9. Belum termanfaatkannya secara maksimal potensi perikanan yang sangat besar, terutama untuk perikanan tangkap dan budidaya.

## **BAB IV` TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor harus mengacu pada Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Biak Numfor 2019-2023 yang sesuai dengan bidang Perikanan yaitu :

**Visi : “*BIAK NUMFOR YANG RELIGIUS, BERKARAKTER DAN BERBUDAYA SEBAGAI SUMBU PERTUMBUHAN YANG BERDAYA SAING MENUJU KESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN*”.**

**Misi : 1. Meningkatkan Perekonomian Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah**

### **4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Perikanan**

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Maka Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor menetapkan beberapa tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Nelayan
3. Meningkatkan Gemar makan ikan kepada Masyarakat
4. Meningkatkan fungsi Sarana prasarana Pengolahan ikan dan Tempat Pelelangan Ikan
5. Meningkatkan Produksi Perikanan Meningkatkan Pembinaan Kelompok Nelayan

### **4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Biak Nimfor adalah sebagai berikut :

- 1. Tujuan :** Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah  
Sasaran : - Meningkatnya Pelayanan Perkantoran  
              - Meningkatnya kualitas pelayanan apratur
- 2. Tujuan :** Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Nelayan  
Sasaran : - Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sub sektor perikanan  
              - Meningkatnya usaha di Bidang Perikanan Kelompok Nelayan Mandiri

- Meningkatkan Rata-Rata Pendapatan Nelayan
- Meningkatnya Pelayanan Bagi Nelayan
- 3. **Tujuan** : Meningkatkan sosialisasi Kampanye Gemar makan ikan kepada Masyarakat  
Sasaran : - Meningkatnya Tingkat Konsumsi Ikan
- 4. **Tujuan** : Meningkatkan fungsi Sarana prasarana Pengolahan ikan dan Tempat Pelelangan Ikan  
Sasaran : - Memfungsikan SKPT/Pangkalan Pendaratan Ikan secara Optimal
- 5. **Tujuan** : Meningkatkan Produksi Perikanan  
Sasaran : - Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap  
- Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

**Tabel 4. 1. Tujuan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pada Misi 2 RPJMD Kabupaten Biak Numfor**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				I	II	III	IV	V
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Presentasi Pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kualitas pelayanan apratur	Presentasi Kinerja Aparatur yang akuntabel	100	100	100	100	100
2.	Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Nelayan	Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sub sektor perikanan	Jumlah kontribusi capaian PDRB Sub Sektor Perikanan dalam (Rp)	1.854.000.000	1.910.000.000	1.967.000.000	2.028.000.000	9.557.000.000
		Meningkatnya usaha di Bidang Perikanan Kelompok Nelayan Mandiri	Cakupan Bina Kelompok Nelayan Mandiri	47	49	51	53	55
		Meningkatnya Rata-Rata Pendapatan Nelayan	Rata-rata pendapatan nelayan dalam (Rupiah)	1.260.000	1.320.000	1.380.000	1.440.000	1.500.000
		Meningkatnya Pelayanan Bagi Nelayan	Cakupan Nelayan yang memiliki Kartu Nelayan/KUSUKA (Orang)	15	20	25	30	40
3.	Meningkatkan Gemar makan ikan kepada Masyarakat	Meningkatnya Tingkat Konsumsi Ikan	Tingkat konsumsi ikan (presentase)	46,4	47,3	48,2	49,3	50



**Tujuan dan Sasaran**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				KE-				
(1)	(2)	(3)	(4)	I (5)	II (6)	III (7)	IV (8)	V (9)
4.	Meningkatkan fungsi Sarana prasarana Pengolahan ikan dan Tempat Pelelangan ikan	Memfungsikan SKPT/Pangkalan Pendaratan Ikan secara Optimal	Berfungsinya SKPT/Pangkalan Pendaratan Ikan secara Optimal (presentase)	45	50	55	60	65
5.	Peningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	83.150	84.513	84.075	84.538	85.000
		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi Perikanan Budidaya (Ton)	34	38	50	60	70

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi**

Berdasarkan visi, misi Bupati serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan kebijakan. Adapun strategi dan kebijakan berdasarkan masing-masing Tujuan dan Sasaran adalah sebagai berikut:

**Strategi :**

- a. Peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan
- b. Peningkatan jumlah ikan yang dikirim keluar Biak
- c. Sosialisasi Gemar makan ikan bagi masyarakat
- d. Mengintegrasikan peran berbagai instansi terkait di tingkat Kabupaten, Provinsi, Pusat, BUMD, BUMN dan swasta dalam pengelolaan PPI, TPI dan Fasilitas yang ada dalam PPI dan SKPT
- e. Menerapkan Teknologi Penangkapan dan Fasilitas Sarana Prasarana Penangkapan
- f. Pembinaan Kelompok Nelayan, Pembudidaya, dan Pengolah ikan agar menghasilkan produk yang berkualitas sesuai permintaan pasar
- g. Penyuluhan Nelayan dalam pengelolaan keuangan
- h. Mensosialisasikan manfaat Kartu Nelayan/KUSUKA bagi Nelayan Kecil

#### **5.2. Arah dan Kebijakan**

Arah dan Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Berdasarkan uraian di atas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor dapat dilihat pada Tabel 5.1. sebagai berikut :

Tabel. 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : “ <b>BIAK NUMFOR YANG RELIGIUS, BERKARAKTER DAN BERBUDAYA SEBAGAI SUMBU PERTUMBUHAN YANG BERDAYA SAING MENUJU KESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN</b>				
MISI : <b>Meningkatkan Perekonomian Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah</b>				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah dan Kebijakan
1.	Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan	- menjaga stabilitas dan kenyamanan lingkungan kantor Dinas - Membuat laporan sesuai aturan dan tepat waktu
		Meningkatnya kualitas pelayanan apratur		Penerapan aturan disiplin pegawai
2.	Meningkatkan Kontribusi Sub Sektor Perikanan pada Perekonomian Daerah	Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sub sektor perikanan	Peningkatan jumlah ikan yang dikirim keluar Biak	Memfasilitasi investor di Bidang Perikanan dan kemudaha berinvestasi di Bidang Perikanan
3.	Meningkatkan Gemar makan ikan kepada Masyarakat	Meningkatnya Tingkat Konsumsi Ikan	Soialisasi Gemar makan ikan bagi masyarakat	Melaksanakan lomba cipta menu berbahan baku ikan dan berkoordinas dengan instasi lain yg terkait untuk menggalakkan program pemberian makanan tambahan berbahan baku ikan bagi anak anak usia dini

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah dan Kebijakan
4.	Meningkatkan fungsi Sarana prasarana Pengolahan ikan dan Tempat Pelelangan ikan	Memfungsikan SKPT/Pangkalan Pendaratan Ikan secara Optimal	Mengintegrasikan peran berbagai instansi terkait d tingkat Kabupaten, Provinsi, Pusat, BUMD, BUMN dan swasta dalam pengelolaan PPI, TPI dan Fasilitas yang ada dalam PPI dan SKPT	Membuat Regulasi terkait pebnagian peran dan fungsi dalam PPI, TPI dan SKPT
5.	Peningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Menerapkan Teknolgi Penangkapan dan Fasilitasi Sarana Prasarana Penangkapan	Pemberian bantuan sesuai dengan Kebutuhan Nelayan dan Tujuan Penangkapan serta Fishing Ground
		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya		
6.	Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan	Meningkatnya usaha di Bidang Perikanan Kelompok Nelayan Mandiri	Pembinaan Kelompok Nelayan, Pembudidaya, dan Pengolah ikan agar menghasilkan produk yang berkualitas sesuai permintaan pasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelembagaan kelompok menjadi Badan usaha agar bisa memiliki akses perbankan</li> <li>- Fasilitasi Kelompok pengolah Produk Perikanan agar memenuhi persyaratan untuk mendapatkan ijin Panga Industeri Rumah Tangga</li> </ul>
		Meningkatkan Rata-Rata Pendapatan Nelayan	Penyuluhan Nelayan dalam pengelolaan keuangan	mengintegrasikan kegiatan dengan instansi terkait yang membidangi pembinaan UKM dan pengelolaan keuangan UKM
		Memfasilitasi Rumah Tangga Nelayan dengan Kartu Nelayan/Kusuka	Mensosialisasikan manfaat Kartu Nelayan/KUSUKA bagi Nelayan Kecil	Memfasilitasi pembuatan Kartu Nelayan dan KUSUKA bersama Penyuluh Perikanan, Pemerintah Distrik dan Kampung dan pendampingi untuk pemanfaatan Kartu dimaksud

## **BAB VI**

### **RENCANA PRGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Untuk mendukung pencapaian sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan, Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor telah menyusun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan penjabaran sebagai berikut :

#### **1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

- i. Penyusunan Renstra OPD

#### **2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
- d. Jasa Administrasi Keuangan
- e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- h. Penyediaan Makan dan Minuman
- i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
- k. Penunjang DAK/TP dan kegiatan Pusat lainnya
- l. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

#### **3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja OPD

#### **4. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir**

- a. Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat (pelatihan pengolahan Ikan)
- b. Lomba Cipta Menu berbahan baku ikan
- c. Gemar makan ikan untuk Balita (Posyandu) OAP
- d. Pekan Nasional Kelompok Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) dan Pekan Daerah Kelompok Tani Nelayan Andalan (Peda KTNA)

#### **5. Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

- a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Skala Kecil untuk nelayan (Perahu di Bawah 3 GT, motor tempel jaring, GPS, cool box)
- b. Penyediaan Peralatan bagi Nelayan OAP ( Perahu Motor Tempel, Tali Rumpon, GPS, cool Box, Freezer)

#### **6. Program Pengembangan Budidaya Perikanan**

- a. Pengembangan bibit unggul (bibit dan pakan ikan air tawar)
- b. Pembinaan Budidaya Perikanan Pelatihan Budidaya Rumput Laut)
- c. Penyediaan Sarana dan prasarana Pembudidaya rumput laut (OAP)
- d. Pendampingan kelompok Tani Nelayan

#### **7. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar**

- a. Pengembangan Sarana Budidaya Air Laut (KJA)
- b. Pengembangan Sarana Budidaya Air Tawar/Payau
- c. Pengadaan bibit dan pakan ikan untuk KJA

6.1. INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Tahun 2019-2023.

Tujuan	Sasaran	kode	Program dan kegiatan	indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan	satuan indikator kinerja	capaian pada tahun awal perencanaan		Target kinerja program dan kerangka pendanaan										kondisi kinerja pada akhir periode RENSTRA-PD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi (Kampung / Distrik/Kabupaten/Kota)		
						2017 Target	2018 Rp.	2019		2020		2021		2022		2023						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
1. Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran		<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>																			
			1. Penyusunan Renstra OPD	Tersusunnya Dokuemn Renstra yang berisi Program dan kegiatan untuk 5 Tahun	Dokumen	-	-	1	15.000.000													
			Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran																			
			1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jaringan internet, air dan listrik	Bulan			12	75.000.000	12	84.000.000	12	83.000.000	12	94.000.000	12	105.000.000	60				
			2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Adanya service computer dan printer	Unit			4	17.000.000	2	6.000.000	2	7.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	16				
		Service Ac			Unit			2		1		1		1		1		6				
		Pemeliharaan alat komunikasi			Set			1														
			3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan kantor	Unit			6	50.000.000	4	28.000.000	4	30.000.000	4	32.000.000	4	34.000.000	22				
	4. Jasa	Adanya	orang			12	60.000	12	90.000	12	10.000.	12	110.000	12	120.000	60						

**Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

		Administrasi Keuangan	Honorarium PA,PPK, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang					0.000		0.000		000		.000				
			Adanya Jasa Sopir dan Satpam	orang			2		2		2		2		2		10	
			Adanya laporan administrasi keuangan	Dokumen			1		1		1		1		1		5	
		5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	tersedianya bahan dan peralatan kebersihan	jenis			17	5.000.000	17	6.000.000	17	7.000.000	17	8.000.000	17	9.000.000	85	
		6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis			39	20.000.000	32	18.000.000	32	19.000.000	32	20.000.000	32	20.000.000	167	
		7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	lembar			23875	11.000.000	23875	11.000.000	23875	12.000.000	23875	13.000.000	23875	14.000.000	119.375	
		8. Penyediaan Makan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	pack			750	30.000.000	750	30.000.000	750	32.000.000	750	34.000.000	750	36.000.000	3750	
		9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	adanya Peningkatan koordinasi antar daerah	orang/hari			75	248.000.000	75	248.000.000	75	258.000.000	75	270.000.000	75	282.000.000	375	
		10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terselenggara rapat dan konsultasi dalam daerah	orang/hari			51	51.120.000	51	51.120.000	51	55.000.000	51	60.000.000	51	67.000.000	255	
		11. Penunjang DAK/TP dan kegiatan Pusat lainnya	Tersedianya Administrasi Lelang, Evaluasi, koordinasi, Monitoring & Pelaporan kegiatan dengan sumber Dak/TP dan	Bulan			12	113.948.000	12	115.000.000	12	125.000.000	12	132.000.000	12	140.000.000	60	

**Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

			kegiatan pusat lainnya																
			12. Penyediaan Sarana Persewaan Mobilitas Darat dan Air																
	Meningkatnya kualitas pelayanan apratur		<b>Progran Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																
			1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian Dinas	setel				-	-	-	60	90.000.000	-	-	-	-	60	
			<b>Program Peningkatan Pengembangan, Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>																
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan lkhtisar realisasi kinerja OPD	Tersedianya laporan keuangan OPD yang akuntabel dan tepat waktu	Dokumen		6	15.000.000	6	16.000.000	6	17.000.000	6	18.000.000	6	19.000.000	30		
2. Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Nelayan	Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sub sektor			Tingkat Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Persen	2,5	3	3	3,5		3,5		4		4		4		
	Meningkatnya usaha di Bidang Perikanan Kelompok Nelayan Mandiri			Cakupan Bina Kelompok Nelayan Mandiri	Kelompok		46	47	49		51		53		55		55		
	Meningkatnya Rata-Rata Pendapatan Nelayan			Rata-rata pendapatan nelayan	Rp			1.200.000		1.250.000.000		1.320.000		1.380.000		1.440.000		1.500.000	
	Meningkatnya Pelayanan Bagi Nelayan			Cakupan Nelayan yang Memiliki Kartu Nelayan (KUSUKA)	Orang														
3. Meningkatkan Gemar	Meningkatnya					43,5	45,5	47,30		48,20		49,10		50		50		50	



**Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

makan ikan kepada Masyarakat	Tingkat Konsumsi Ikan																			
			<b>Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir</b>																	
			1. Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat (pelatihan pengolahan ikan)	Meningkatnya Keterampilan Pengeolahan ikan kelompok wanita pesisir																
			2. Lomba Cipta Menu berbahan baku ikan	Peningkatan kreatifitas dan inovasi Hasil Pengeolahan Ikan	orang	30	30	-	-	30	190.000.000	30	200.000.000	30	220.000.000	30	220.000.000	120		
			3. Gemar makan ikan untuk Balita (Posyandu) OAP	pemberian makanan tambahan berbahan baku ikan dalam rangka Gerakan memasyarakatkan makan ikan	paket	-	90	-	-	150	100.000.000	150	120.000.000	150	140.000.000	150	150.000.000	600		
			4. Pekan Nasional Kelompok Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) dan Pekan Daerah Kelompok Tani Nelayan Andalan (Peda KTNA)	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan nelayan dalam alih teknologi (Penas dan Peda)	orang					15	300.000.000									
4. Meningkatkan fungsi Sarana prasarana Pengolahan ikan dan Tempat Pelelangan ikan	Memfungsikan SKPT/Pangkalan Pendaratan Ikan secara Optimal																			
5. Peningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap		<b>Program Pengembangan Perikanan Tangkap</b>	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	76.662	82.656	83.150		83.613		84.075		84.538		85.000		85.000		

**Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

		1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Skala Kecil untuk nelayan (Perahu di Bawah 3 GT, motor tempel dan peralatan penunjang lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai untuk penangkapan ikan bagi Nelayan	paket	69	154	20	3.150.000.000	30	5.494.849.000	30	5.050.000.000	30	5.100.000.000	30	5.150.000.000	120		
		2. Penyediaan Peralatan bagi Nelayan OAP ( Perahu Motor dan peralatan penunjang lainnya)					-	-	30	3.900.000.000	30	4.000.000.000	30	4.100.000.000	30	4.150.000.000	120		
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya		<b>Program Pengembangan Perikanan Budiaya</b>	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	16	32	34		38		50		60		70		70		
		1. Pengembangan Bibit unggul (bibit dan pakan air tawar)	Tersedianya bibit ikan air tawar dan pakan ikan	zak			-	-	500	300.000.000	-	-	500	350.000.000	-	-	1.000		
			Tersedianya bibit unggul air tawar	ekor	20.000	-	-	-	20.000	600.000.000		-	20.000	650.000.000			40.000		
		2. Pembinaan Budidaya Perikanan Pelatihan Budidaya Rumput Laut)	Terlatihnya Pembudiaya Rumput laut	orang			-	-	30	185.000.000	-	-	30	200.000.000	-	-	60		
		3. Penyediaan Sarana dan prasarana Pembudidaya rumput laut (OAP)	Tersedianya Sarana Produksi dan Pembibitan Rumput Laut	Unit			-	-	15	900.000.000	-	-	-	-	15	1.000.000.000	30		
		4. Pendampingan kelompok Tani Nelayan	Adanya pendampingan kelompok pembudidaya	orang	4	4	-	-	4	200.000.000	4	220.000.000	4	220.000.000	4	240.000.000	16		
		<b>Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar</b>																	

**Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

			1. Pengembangan Sarana Budidaya Air Laut (KJA)	Adanya KJA untuk pembesaran ikan ekonomis penting	Unit			-	-	4	480.000.000					4	600.000.000	12		
			2. Pengembangan Sarana Budidaya Air Tawar/Payau	Tersedianya sarana Budidaya Kepiting Bakau	Unit			-	-	8	480.000.000					8	500.000.000	6		
			3. Pengadaan bibit dan pakan ikan untuk KJA	Tersedianya Bibit Ikan untuk KJA	ekor	10.000	26.704	-	-	30.000	1.125.000.000					30.000	1.500.000.000	60.000		
				Tersedianya Pakan ikan untuk KJA	Zak	500	700	-	-	1.000	600.000.000					1.000	700.000.000	2.000		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **7.1. Indikator Kinerja**

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: Subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan : Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja. (Meneg PAN, 2008: 2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan dan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Sistem AKIP, seluruh program, sub program, kegiatan sub kegiatan dilakukan pengukuran capaian keuangan dan capaian fisik. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **7.2. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci**

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berbagai definisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa).

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator*. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama.

IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan.

Pemilihan Indikator kinerja pada pemerintah kabupaten/kota menggunakan indikator kinerja pada tingkat *outcome* dan menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan instansi pemerintah tersebut, dengan kata lain, pemilihan indikator kinerja pada pemerintah daerah bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya.

**Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO.	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Presentasi Pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	100	100	100	100	100	100	100
	Presentasi Kinerja Aparatur yang akuntabel	100	100	100	100	100	100	100
2.	Jumlah kontribusi capaian PDRB Sub Sektor Perikanan dalam (Rp)		1.854.000.000	1.910.000.000	1.967.000.000	2.028.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
3.	Cakupan Bina Kelompok Nelayan Mandiri		47	49	51	53	55	55
4.	Rata-rata pendapatan nelayan dalam (Rupiah)	1.200.000	1.260.000	1.320.000	1.380.000	1.440.000	1.500.000	1.500.000
5.	Cakupan Nelayan yang memiliki Kartu Nelayan/KUSUKA (Orang)		15	20	25	30	40	40
6.	Tingkat konsumsi ikan (presentase)	45,5	46,4	47,3	48,2	49,3	50	50

**Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

NO.	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.	Berfungsinya SKPT/Pangkalan Pendaratan Ikan secara Optimal (presentase)	40	45	50	55	60	65	65
8.	jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	76.662	82.656	84.075	84.538	85.000	85.000	85.000
9.	Jumlah produksi Perikanan Budidaya (Ton)	34	38	50	60	70	70	70

## **BAB VIII P E N U T U P**

Rencana Strategi yang memuat rencana dalam kurun waktu lima tahun telah disusun sesuai dengan tahapannya dengan melibatkan semua pihak yang ada pada Dinas Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor telah memperhatikan permasalahan, faktor-faktor penghambat dan faktor – faktor pendorong dan juga memperhitungkan tantangan dan peluang untuk pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan Visi, Misi yang ditetapkan ditempuh melalui kebijakan program dan kegiatan, yang dihimpun berdasarkan Musrenbangdes, Musrenbangcam dan Musrenbangkab. Program yang dihasilkan melalui Musrenbang tersebut dipadukan dan disingkrankan dengan rencana program yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten yang dituangkan dalam Renstra ini.

Program dan kegiatan tahunan yang telah ditetapkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA) untuk mencapai hasil yang maksimal dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Dan keberhasilan dari program dan kegiatan sangat diperlukan partisipasi semua pihak baik pemerintah, swasta, masyarakat dan juga dari DPRD. Dan pada akhir tahun wajib dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan, dan mengetahui penyebab masalah yang menghambat pencapaian. Tujuan dan sasaran, dimana hasil dari evaluasi tahunan tersebut dituangkan kedalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Renstra ini disusun sebagai pedoman Dinas Dinas Perikanan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan sampai lima tahun mendatang. Menyadari kekurangan dan keterbatasan kami dalam penyusunan Renstra ini, kami sangat memerlukan partisipasi dari semua pihak berupa usul dan saran – saran untuk perbaikan pada berikutnya.

**Biak, Nopember 2019**  
**Kepala Dinas Perikanan**  
**Kabupaten Biak Numfor**

**EFFENDI IGIRISA, S.Pi, MM**  
**NIP. 19690424 199703 1 007**